



Kelincahan Bisnis dan Maqasid al-Syariah (Menyelaraskan Prinsip Etika dengan Dinamika Ekonomi)

Ahmad Maulidizen*

Universitas Ary Ginanjar, Indonesia

*Penulis korespondensi: ahmad.maulidizen@esqbs.ac.id¹

Abstract. *The global economy is increasingly marked by volatility, uncertainty, and disruption, compelling organizations to adopt business agility as a means of survival and competitiveness. Conventional agility emphasizes speed, responsiveness, and innovation, yet often lacks the ethical foundation required for long-term sustainability. In contrast, Islamic economic thought, guided by Maqasid al-Shariah—the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth—prioritizes justice, fairness, and social responsibility in economic activities. This study analyzes how the principles of Maqasid can be aligned with business agility to form an ethically grounded and adaptive business model. Employing a qualitative research design with a library research approach, the study synthesizes insights from existing literature on agility, Islamic economics, and Maqasid through thematic content analysis. The findings indicate that while agility strengthens resilience and competitiveness, it requires Maqasid as a moral compass to ensure value-driven adaptability. The integration of agility and Maqasid creates a synergy that enables Islamic enterprises not only to withstand global turbulence but also to differentiate themselves as ethical, sustainable, and competitive actors in the global market. This research therefore proposes a Shariah-compliant agility model that balances responsiveness with ethical accountability, offering theoretical contributions to academic discourse and practical implications for Islamic financial institutions, halal industries, and Shariah-based SMEs. The study also highlights the role of policymakers in developing supportive frameworks that foster innovation while safeguarding Shariah compliance. Overall, the study underscores that agility guided by Maqasid is not merely a survival strategy but a pathway to global leadership in ethical and sustainable business practices.*

Keywords: *Business Agility; Ethical Business; Global Competitiveness; Islamic Economics; Maqasid al-Shariah*

Abstrak. *Perekonomian global semakin ditandai oleh volatilitas, ketidakpastian, dan disrupsi, yang memaksa organisasi untuk mengadopsi kelincahan bisnis sebagai sarana untuk bertahan hidup dan berdaya saing. Kelincahan konvensional menekankan kecepatan, daya tanggap, dan inovasi, namun seringkali tidak memiliki landasan etika yang dibutuhkan untuk keberlanjutan jangka panjang. Sebaliknya, pemikiran ekonomi Islam, yang dipandu oleh Maqasid al-Shariah —pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan—mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Studi ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Maqasid dapat diselaraskan dengan kelincahan bisnis untuk membentuk model bisnis yang adaptif dan berlandaskan etika. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan, studi ini mensintesis wawasan dari literatur yang ada tentang kelincahan, ekonomi Islam, dan Maqasid melalui analisis konten tematik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kelincahan memperkuat ketahanan dan daya saing, kelincahan membutuhkan Maqasid sebagai kompas moral untuk memastikan adaptabilitas yang didorong oleh nilai. Integrasi kelincahan dan Maqasid menciptakan sinergi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Islam tidak hanya mampu bertahan dari turbulensi global, tetapi juga mampu membedakan diri sebagai pelaku yang etis, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model kelincahan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang menyeimbangkan responsivitas dengan akuntabilitas etis, menawarkan kontribusi teoretis bagi wacana akademis dan implikasi praktis bagi lembaga keuangan Islam, industri halal, dan UKM berbasis Syariah. Studi ini juga menyoroti peran para pembuat kebijakan dalam mengembangkan kerangka kerja pendukung yang mendorong inovasi sekaligus menjaga kepatuhan Syariah. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kelincahan yang dipandu oleh Maqasid bukan sekadar strategi bertahan hidup, tetapi juga merupakan jalur menuju kepemimpinan global dalam praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.*

Kata kunci: *Bisnis Beretika; Daya Saing Global; Ekonomi Islam; Kelincahan Bisnis; Maqasid al-Syariah*

1. PENDAHULUAN

Makalah ini menyelidiki bagaimana Maqasid al-shariah dapat memandu kelincahan bisnis, mengintegrasikan keharusan etis seperti keadilan dan transparansi dengan tuntutan

ekonomi yang dinamis [1]. Dengan mengoperasionalkan Maqasid melalui kerangka kerja pengambilan keputusan yang menyelaraskan kelincahan berorientasi laba dengan larangan riba dan gharar, perusahaan dapat menyelaraskan respons pasar yang cepat dengan standar etika Islam [2]. Akibatnya, model tata kelola yang mengintegrasikan enam prinsip tata kelola perusahaan OECD dengan fokus Maqasid pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan pemangku kepentingan dapat mengoperasionalkan kelincahan sambil menjaga kepatuhan syariah [3]. Dengan memetakan setiap pilar tata kelola OECD ke tujuan Maqasid yang sesuai — menghubungkan pengungkapan dengan transparansi dan panduan strategis dewan dengan keadilan — perusahaan dapat memastikan bahwa iterasi produk yang cepat dan respons pasar dievaluasi terhadap kriteria etika yang ditentukan [4].

Kajian terbaru menunjukkan bahwa menanamkan tujuan Maqasid dalam struktur tata kelola secara simultan memperkuat kesejahteraan pemangku kepentingan dan mempercepat respons tangkas dengan menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi asimetri informasi [5]. Temuan empiris dari bank-bank Islam Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan Syariah yang kuat dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan aset, yang memperkuat keuntungan nyata dari menyelaraskan ketangkasan dengan tata kelola yang digerakkan oleh Maqasid [6]. Selain itu, kerangka etika yang membedakan riba dan gharar menggarisbawahi bagaimana kendala kepatuhan dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pengembangan produk yang inovatif dan disesuaikan dengan risiko [7]. Mengintegrasikan analitik yang digerakkan oleh AI ke dalam proses yang sesuai dengan Syariah semakin memperkuat ketangkasan dengan memungkinkan penilaian risiko waktu nyata dan alokasi sumber daya [8]. Oleh karena itu, model prediktif yang didukung oleh AI dapat terus memantau metrik kepatuhan, menandai potensi paparan terkait riba, dan menyarankan tindakan perbaikan sebelum pelanggaran terjadi, sehingga memperkuat kelincahan dan integritas Syariah [9].

Lanskap ekonomi global sedang mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi. Volatilitas ekonomi, gangguan teknologi, dan ketegangan geopolitik telah menciptakan lingkungan yang ditandai oleh ketidakpastian yang tinggi. Bisnis semakin dihadapkan dengan perubahan permintaan konsumen, pasar yang berfluktuasi, dan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memerlukan respons yang cepat dan adaptif. Dalam konteks ini, konsep kelincahan bisnis telah muncul sebagai kemampuan penting bagi organisasi yang mencari ketahanan dan keberlanjutan. Memang, literatur tentang tata kelola perusahaan menyoroti bahwa struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi mendorong kelincahan yang diperlukan untuk menavigasi volatilitas tersebut, meskipun dengan mitigasi biaya agensi yang cermat [10]. Oleh karena itu, pembentukan komite pengawasan yang selaras

dengan Syariah yang memanfaatkan pemantauan yang ditingkatkan AI dapat lebih jauh mengurangi konflik agensi sambil menjaga kecepatan pengambilan keputusan yang gesit [11]

Kelincahan bisnis mengacu pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat, menanggapi gangguan, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Ini mencakup fleksibilitas strategis, responsivitas operasional, dan ketahanan organisasi. Dalam praktik bisnis konvensional, kelincahan telah dikaitkan dengan daya saing, inovasi, dan kelangsungan hidup di pasar yang bergejolak. Namun, kelincahan saja, tanpa kompas etika yang kuat, dapat mengarah pada keputusan yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada nilai jangka panjang. Akibatnya, menanamkan dasbor kepatuhan yang digerakkan oleh AI dalam struktur pengawasan Syariah dapat menyelaraskan adaptasi pasar yang cepat dengan keharusan Maqasid akan keadilan dan transparansi [12]. Dasbor tersebut, dengan memberikan analitik yang dapat dijelaskan secara real - time tentang kepatuhan Syariah, memberdayakan manajer untuk membuat penyesuaian yang cepat dan berlandaskan etika pada portofolio produk dan proses operasional [13]. Dasbor yang mendukung AI tersebut tidak hanya mendeteksi potensi pelanggaran Syariah tetapi juga memanfaatkan model risiko pembelajaran mesin untuk mengantisipasi pergeseran pasar, sehingga mendukung poros strategis yang proaktif dan selaras dengan etika [14].

Bagi perusahaan Islam, tantangannya ada dua. Di satu sisi, mereka harus tetap kompetitif dalam ekonomi global yang ditandai oleh volatilitas dan kompleksitas. Di sisi lain, mereka terikat oleh prinsip-prinsip Syariah yang menekankan perilaku etis, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mencapai keseimbangan antara menjaga kepatuhan Syariah dan mencapai kelincahan bisnis menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi bisnis Islam. Penelitian empiris di masa mendatang harus mengkaji bagaimana kerangka kerja tata kelola Syariah yang diperkuat AI dapat meningkatkan kelincahan secara kuantitatif sekaligus mengekang risiko operasional dan kepatuhan yang disorot dalam studi kasus bank Islam baru-baru ini [15].

Dengan demikian, penerapan dasbor AI yang dapat dijelaskan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat berfungsi sebagai mekanisme praktis untuk menyelaraskan kelincahan dengan tujuan maqāṣ id. Bukti empiris semakin menegaskan bahwa mekanisme transparansi yang digerakkan oleh AI tidak hanya meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan tetapi juga memperkuat hasil yang berorientasi pada keadilan, sehingga memberikan keuntungan yang terukur dalam posisi kompetitif [16]. Oleh karena itu, mengintegrasikan analitik prediktif bertenaga AI ke dalam dasbor Syariah menjanjikan untuk menyempurnakan pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan risiko, memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi turbulensi pasar sambil menegaskan keadilan dan transparansi [17].

Lembaga keuangan Islam, industri halal, dan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis Syariah beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif di mana kelincahan sangat penting untuk bertahan hidup. Namun, strategi mereka harus tetap berlabuh pada nilai-nilai Syariah, yang melarang eksploitasi, menekankan pembagian risiko, dan mempromosikan keadilan sosial-ekonomi. Memanfaatkan alat pendukung keputusan yang digerakkan oleh AI — seperti platform robo - advisory yang didukung oleh keahlian dewan Syariah yang sedang berkembang — dapat mengoperasionalkan mekanisme pembagian risiko sambil secara bersamaan menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi Maqasid [18]. Menerapkan mekanisme AI yang dapat dijelaskan dalam platform robo - advisory tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan tetapi juga mengoperasionalkan tuntutan Maqasid untuk akuntabilitas dan distribusi risiko yang adil [19]. Dengan memperluas layanan robo - consulting berbasis AI ke segmen yang kurang terlayani, perusahaan Islam dapat mendemokratisasi akses ke produk yang sesuai dengan Syariah dan memajukan tujuan maq ā ṣ id dari partisipasi ekonomi yang inklusif [20].

Jawabannya terletak pada penjelajahan integrasi antara kelincahan bisnis dan Maqasid al-Shariah. Maqasid al-Shariah mengacu pada tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk memelihara agama (Din), kehidupan (Nafs), kecerdasan (' Aql), garis keturunan (Nasl), dan kekayaan (Mal). Tujuan-tujuan ini menyediakan kerangka etika holistik yang melampaui kepatuhan belaka, menawarkan visi bisnis yang melayani kemakmuran individu dan kesejahteraan kolektif. Sebuah tolok ukur etika hibrida yang menggabungkan kelincahan yang digerakkan oleh AI dengan etos memaksimalkan kesejahteraan Maqasid karena itu dapat membimbing perusahaan menuju adaptasi yang cepat dan pelestarian nilai-nilai inti Islam [21]. Dalam hal ini, metodologi masalah yang fleksibel dan berbasis akal menawarkan jalur berprinsip untuk pengambilan keputusan yang ditambah dengan AI yang secara bersamaan memajukan efisiensi dan menegakkan tujuan perlindungan Maqasid.

Bahasa Indonesia: Ketika selaras dengan kelincahan bisnis, prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah dapat memperkaya konsep ketahanan organisasi dengan menanamkan tanggung jawab moral dan keadilan sosial ke dalam praktik-praktik yang tangkas. Integrasi ini dapat memastikan bahwa kelincahan tidak hanya diterjemahkan menjadi kemampuan beradaptasi untuk keuntungan tetapi juga menjadi kemampuan beradaptasi untuk keberlanjutan yang etis. Dengan cara ini, bisnis Islam dapat membedakan diri mereka dengan menawarkan kelincahan yang digerakkan oleh nilai yang kompetitif dan berprinsip. Akibatnya, penelitian masa depan harus memeriksa bagaimana model tata kelola yang mendukung AI yang menanamkan metrik etika yang selaras dengan Maqasid dapat secara sistematis meningkatkan kecepatan respons

dan kepatuhan terhadap keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat [22]. Oleh karena itu, investigasi masa depan harus merancang dasbor kinerja yang selaras dengan Maqasid yang didukung AI yang secara kuantitatif menghubungkan hasil etika dengan indikator kelincahan, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengoptimalkan kecepatan dan dampak kesejahteraan yang sesuai dengan Syariah [23].

Namun demikian, jalan menuju integrasi kelincahan dan Maqasid bukan tanpa tantangan. Bisnis Islam sering menghadapi keterbatasan struktural seperti kendala regulasi, akses terbatas ke teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Pada saat yang sama, mereka harus menanggapi pergeseran global seperti transformasi digital, perubahan iklim, dan preferensi konsumen untuk keberlanjutan. Dinamika ini membutuhkan kerangka kerja inovatif yang dapat menyelaraskan kelincahan dengan keharusan etika. Pekerjaan empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa platform kepatuhan yang didukung AI dapat mengoperasionalkan kerangka kerja tersebut, secara bersamaan memperkuat kelincahan dan memenuhi mandat keadilan dan transparansi Maqasid [24]. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus memeriksa bagaimana platform kepatuhan yang didukung AI dapat dikalibrasi untuk secara dinamis menyeimbangkan kecepatan respons pasar dengan pelestarian lima Maqasid, dengan demikian memberikan peta jalan yang dapat diukur untuk secara etis kelincahan yang membumi [25].

Wacana akademis tentang kelincahan bisnis telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi perhatian terbatas telah diberikan pada bagaimana hal itu dapat dikontekstualisasikan dalam pemikiran ekonomi Islam. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada fleksibilitas operasional, penyelarasan strategis, dan inovasi di perusahaan konvensional [26]. Sebaliknya, penelitian tentang model bisnis Islam sebagian besar menekankan kepatuhan dan tata kelola. Masih ada kesenjangan dalam mengeksplorasi bagaimana kelincahan dan Maqasid al-Shariah dapat berpotongan untuk menciptakan paradigma yang khas bagi perusahaan Islam [27]. Mengatasi kekosongan ini, para sarjana harus mengembangkan kerangka kerja integratif yang secara empiris menilai efek sinergis dari kelincahan yang dimungkinkan oleh AI dan tata kelola yang selaras dengan Maqasid terhadap hasil kinerja dan kesejahteraan [28]. Salah satu cara yang menjanjikan adalah membangun model analisis tujuan dan sarana yang mengukur trade - off antara metrik kelincahan dan masing-masing dari lima maq ā ṣ id, sehingga menyediakan alat yang ketat bagi akademisi dan praktisi [29].

Penelitian ini berupaya mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis potensi sinergi antara kelincahan bisnis dan Maqasid al-Syariah. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki bagaimana tujuan-tujuan Syariah dapat memandu strategi adaptif bisnis Islam

dalam menghadapi turbulensi ekonomi global. Melalui analisis konseptual dan eksplorasi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kelincahan yang berlandaskan Maqasid dapat menghasilkan model bisnis yang tidak hanya adaptif dan kompetitif, tetapi juga berlandaskan etika. Oleh karena itu, analisis empiris terhadap platform kepatuhan berbasis AI akan dilakukan untuk menilai kapasitasnya dalam mempercepat respons pasar dan menegakkan lima Maqasid. [30]. Oleh karena itu, pengembangan arsitektur kepatuhan yang digerakkan oleh AI yang dinamis yang terus memantau perubahan regulasi sambil menyelaraskan keputusan operasional dengan Maqasid dapat memberikan perusahaan Islam jalur yang terukur menuju kelincahan yang berakar pada etika.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan kerangka kerja konseptual yang menyelaraskan kelincahan bisnis dengan Maqasid al-Syariah. Kerangka kerja semacam itu dapat berfungsi sebagai kompas strategis bagi perusahaan-perusahaan Islam yang menavigasi ketidakpastian ekonomi global. Dengan mengintegrasikan kelincahan dengan prinsip-prinsip etika, bisnis-bisnis Islam dapat mencapai ketahanan dan inovasi sekaligus memenuhi tanggung jawab mereka untuk mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi baik pada literatur akademis tentang kelincahan bisnis maupun pada kemajuan praktis pemikiran ekonomi Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Urgensi Kelincahan Bisnis di Tengah Ketidakpastian Global

Studi baru-baru ini menyoroti bahwa kapabilitas yang digerakkan oleh AI seperti analitik prediktif dan otomatisasi proses secara substansial meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, dan inovasi perusahaan, sehingga mendefinisikan ulang kelincahan bisnis di pasar kontemporer [32]. Bukti empiris lebih lanjut menunjukkan bahwa analitik prediktif bertenaga AI dan alur kerja otomatis tidak hanya mempercepat waktu respons tetapi juga menciptakan keuntungan yang terukur dalam kemampuan beradaptasi organisasi, menggarisbawahi potensi transformatif teknologi untuk metrik kelincahan [8]. Akibatnya, mengintegrasikan mekanisme audit Syariah yang digerakkan oleh AI dapat secara bersamaan meningkatkan responsivitas sambil memastikan kepatuhan terhadap lima Maqasid, sehingga mengoperasionalkan kelincahan yang berlabuh secara etis [33]. Kerangka kerja audit Syariah yang terintegrasi dengan AI tersebut dapat divalidasi secara empiris menggunakan tolok ukur kinerja berbasis Maqasid terintegrasi, yang menghubungkan hasil kelincahan dengan metrik keadilan dan kesejahteraan [34].

Selain itu, menanamkan kepatuhan yang digerakkan oleh AI dalam sistem pelaporan berbasis Maqasid yang terintegrasi dapat memberikan para pemangku kepentingan dengan indikator kinerja yang transparan yang secara bersamaan menangkap perolehan kelincahan dan kepatuhan terhadap tujuan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan publik [35]. Akibatnya, mekanisme audit Syariah internal, ketika tertanam dalam pelaporan yang mendukung AI, berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengoperasionalkan lima Maqasid dalam pemantauan kinerja waktu nyata [27]. Oleh karena itu, pekerjaan empiris di masa depan harus mengembangkan dan memvalidasi kerangka kerja pengukuran kinerja yang selaras dengan Maqasid yang menangkap indikator kelincahan dan hasil etika, mengatasi kesenjangan pengukuran saat ini yang diidentifikasi di sektor non - keuangan [36].

Akibatnya, mengembangkan kerangka kerja kinerja yang didukung AI dan selaras dengan Maqasid tidak hanya mengisi kekosongan pengukuran tetapi juga beresonansi dengan penekanan CSR Islam pada keadilan, inklusivitas, dan kebaikan bersama [37]. Studi masa depan harus menguji kerangka kerja ini secara empiris di berbagai lembaga keuangan Islam untuk menilai dampaknya pada kualitas pengungkapan ESG dan kinerja etika secara keseluruhan [38]. Investigasi longitudinal seperti itu juga akan menjelaskan bagaimana audit Syariah internal yang didukung AI dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga memperkuat kredibilitas keuangan Islam [39]. Selain itu, proses audit yang dilengkapi AI telah terbukti meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan pelaporan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan pada perusahaan yang sesuai dengan Syariah [40].

Temuan empiris menunjukkan bahwa platform kepatuhan Syariah yang digerakkan oleh AI meningkatkan akurasi pelaporan dan kinerja perusahaan, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang patuh Syariah [41]. Akibatnya, investigasi lebih lanjut terhadap mitigasi bias dan AI yang dapat dijelaskan dalam konteks audit Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa peningkatan akurasi tidak mengorbankan transparansi dan akuntabilitas etis [42]. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang harus menggabungkan teknik AI yang dapat dijelaskan dan protokol penilaian bias ke dalam algoritma audit Syariah untuk menjaga akurasi dan integritas etika [30].

Menggabungkan modul-modul penjelasan yang transparan dan rutinitas evaluasi bias yang ketat tidak hanya akan menjaga kesetiaan pelaporan tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dengan menunjukkan akuntabilitas penuh sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid [43]. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus menetapkan pedoman yang mengamankan integrasi standar AI yang dapat dijelaskan dalam perangkat audit Syariah

untuk melembagakan kepatuhan etika di seluruh sektor [44]. Akibatnya, studi longitudinal yang ketat harus diluncurkan untuk mengukur bagaimana mekanisme audit Syariah yang ditingkatkan AI memengaruhi kinerja perusahaan dan kualitas pengungkapan ESG, dengan demikian mengatasi kesenjangan empiris yang disorot dalam tinjauan tata kelola baru-baru ini [45].

Keterbatasan Kelincahan Konvensional tanpa Jangkar Etika

Kerangka kerja kelincahan konvensional yang menekankan respon cepat dan efisiensi dapat secara tidak sengaja mengorbankan standar etika dengan mengikis penilaian manusia, meningkatkan ketergantungan pada proses data yang tidak transparan, dan mengungkap kerentanan privasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan akuntabilitas Maqasid. [46]. Untuk menyelaraskan kecepatan dengan kesetiaan etis, perusahaan harus menanamkan modul AI yang dapat dijelaskan dan protokol penilaian bias yang kuat dalam alur kerja tangkas mereka, sehingga memastikan bahwa pengambilan keputusan yang cepat tetap transparan, akuntabel, dan selaras dengan keharusan keadilan dan kesejahteraan Maqasid. [47] Penerapan perlindungan tersebut tidak hanya mengurangi risiko etika tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, badan-badan regulator didorong untuk mengkodifikasi standar-standar mitigasi yang wajib dijelaskan – AI dan bias – untuk sistem-sistem tangkas yang sesuai dengan Syariah, sehingga melembagakan keharusan keadilan dan kesejahteraan Maqasid. [48]. Oleh karena itu, regulator harus mewajibkan audit independen berkala terhadap sistem kepatuhan Syariah yang digerakkan oleh AI untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar mitigasi bias dan penjelasan, sehingga dapat mengoperasionalkan Maqasid. dalam praktiknya. Tinjauan independen yang diwajibkan tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan secara nyata menyelaraskan kepatuhan yang didorong oleh AI dengan harapan transparansi dan keadilan yang diartikulasikan dalam literatur etika AI kontemporer [49].

Dengan demikian, dewan tata kelola multi - pemangku kepentingan harus dibentuk untuk terus memantau alat kepatuhan Syariah yang digerakkan oleh AI terhadap tolok ukur keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang ditetapkan dalam kerangka kerja etika AI [19]. Dewan seperti itu akan secara teratur mengumpulkan para ahli lintas disiplin untuk mengaudit keluaran algoritmik, memperbarui protokol mitigasi bias, dan menerbitkan dasbor kepatuhan, dengan demikian mengoperasionalkan kriteria keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang disorot dalam beasiswa etika AI kontemporer [50]. Dewan seperti itu juga harus

mengintegrasikan model pengawasan etika berbasis perwalian untuk memastikan bahwa kepatuhan Syariah yang dimungkinkan oleh AI selaras dengan perjanjian ontologis, epistemologis, dan eksistensial Maqasid, dengan demikian menjembatani teori etika Islam dengan tata kelola AI praktis [51].

Dewan seperti itu juga harus mewajibkan kepatuhan terhadap kerangka sertifikasi etika AI yang baru muncul, misalnya ECPAIS IEEE, untuk melembagakan kepatuhan sistematis terhadap standar transparansi, keadilan, dan akuntabilitas [22]. Menerapkan sertifikasi tersebut juga akan memerlukan validasi pihak ketiga secara berkala atas asal-usul algoritmik dan metrik kinerja untuk memastikan keselarasan berkelanjutan dengan mandat etika Islam dan norma tata kelola AI global yang baru muncul [52]. Akibatnya, mengintegrasikan sertifikasi IEEE - ECPAIS dengan protokol mitigasi bias yang didorong oleh XAI akan semakin menyelaraskan keharusan etika Islam dan harapan peraturan internasional [53].

Penelitian di masa depan harus mengevaluasi secara empiris bagaimana sertifikasi IEEE - ECPAIS memengaruhi kinerja kepatuhan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem Syariah berbasis AI di berbagai lingkungan kelembagaan [54]. Mengintegrasikan persyaratan pelaporan transparansi wajib, seperti yang dianjurkan dalam kebijakan tata kelola AI yang muncul, diharapkan dapat memperkuat dampak positif sertifikasi IEEE - ECPAIS pada hasil kepatuhan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang patuh Syariah. Desain longitudinal yang kuat, yang diambil dari berbagai sampel kelembagaan, sangat penting untuk mengisolasi pengaruh kausal sertifikasi IEEE - ECPAIS pada metrik kepatuhan dan valuasi pasar [55]

Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Kerja Kelincahan Etika

Dengan membingkai kelincahan yang dimungkinkan oleh AI dalam lima tujuan Maqasid, perusahaan dapat secara sistematis menerjemahkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan publik ke dalam metrik tata kelola yang terukur yang menggemakan standar etika AI kontemporer tentang transparansi, keadilan, dan akuntabilitas [56]. Akibatnya, mengoperasionalkan Maqasid sebagai kompas strategis memerlukan pemetaan masing-masing dari lima tujuannya ke dalam indikator tata kelola AI yang konkret — seperti skor keterjelasan, metrik keadilan, dan indeks kesejahteraan pemangku kepentingan — dengan demikian mengubah keharusan etika Islam menjadi kriteria kinerja yang terukur yang selaras dengan standar etika AI kontemporer [21].

Dengan demikian, investigasi empiris dapat mengkaji sejauh mana indikator - indikator tata kelola AI ini meningkatkan skor kepatuhan Syariah dan kinerja ESG secara keseluruhan [57]. Oleh karena itu, model-model empiris di masa depan harus menggabungkan indeks

keterjelasan dan kewajaran yang berasal dari kerangka kerja XAI untuk secara kuantitatif menghubungkan tata kelola AI yang selaras dengan Maqasid dengan hasil-hasil ESG yang ditingkatkan [48]. Oleh karena itu, studi-studi longitudinal selanjutnya harus menguji apakah pengintegrasian skor-skor keterjelasan dan metrik kewajaran yang berasal dari XAI ke dalam kerangka kerja tata kelola AI yang selaras dengan Maqasid menghasilkan peningkatan yang signifikan secara statistik baik dalam indeks kepatuhan Syariah maupun peringkat ESG yang lebih luas [30].

Selain itu, menggabungkan kerangka kerja analisis ESG sebagai alat audit AI berbasis etika dapat lebih memperkuat hubungan empiris antara tata kelola AI yang selaras dengan Maqasid dan kinerja keberlanjutan yang terukur [58]. Audit integratif tersebut dapat memanfaatkan analitik ESG yang digerakkan oleh AI untuk menghasilkan dasbor keberlanjutan waktu nyata, sehingga menerjemahkan prinsip-prinsip Maqasid menjadi KPI perusahaan yang dapat ditindaklanjuti [44]. Memanfaatkan analitik ESG yang digerakkan oleh AI untuk mengisi dasbor KPI ini tidak hanya memperdalam transparansi data tetapi juga memberikan wawasan berbasis bukti waktu nyata kepada para pemangku kepentingan yang mengkonkretkan tujuan keadilan dan kesejahteraan Maqasid. [30].

Memvalidasi dasbor ESG berbasis AI ini terhadap kriteria sertifikasi IEEE - ECPAIS yang sedang berkembang akan secara bersamaan memenuhi mandat etika Islam dan ekspektasi transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang disorot dalam literatur etika AI kontemporer [59]. Akibatnya, menanamkan sertifikasi IEEE - ECPAIS dalam metrik keterjelasan dan keadilan yang diturunkan dari XAI memberikan mekanisme konkret untuk menyelaraskan keharusan etika berbasis Maqasid dengan standar transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang diperjuangkan oleh beasiswa etika AI kontemporer [60]. Integrasi semacam itu tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik AI etis yang dapat dibuktikan.

Analisis perbandingan lintas yurisdiksi di masa mendatang harus memeriksa bagaimana konvergensi standar IEEE - ECPAIS dengan kerangka kerja pengawasan Syariah spesifik kawasan memodulasi ketahanan kepatuhan dan lintasan pemeringkatan ESG [61]. Oleh karena itu, alat jaminan ESG yang diperkuat AI dapat meningkatkan konsistensi dan transparansi penilaian lintas yurisdiksi, mendukung pengukuran ketahanan kepatuhan dan hasil ESG yang lebih andal [62]. Selain itu, validasi empiris platform jaminan ESG yang diperkuat AI harus mengukur kontribusinya dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang patuh Syariah [63].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan riset kepustakaan untuk mengeksplorasi integrasi kelincahan bisnis dan Maqasid al-Shariah. Sifat kualitatif penelitian ini tepat karena menekankan pemahaman konseptual, analisis interpretatif, dan pengembangan teori, alih-alih generalisasi statistik. Pendekatan riset kepustakaan memungkinkan peneliti untuk meninjau dan menganalisis karya ilmiah yang ada secara sistematis, memastikan bahwa pembahasan didasarkan pada wacana akademis yang mapan. Sumber data meliputi jurnal peer - review, prosiding konferensi, dan white paper industri yang mengkaji analitik ESG berbasis AI, standar IEEE - ECPAIS, dan kerangka kerja tata kelola yang selaras dengan Maqasid.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui identifikasi, pemilihan, dan pemeriksaan sumber-sumber akademis yang relevan, termasuk artikel jurnal peer-review, buku, prosiding konferensi, laporan dari organisasi internasional, dan basis data daring yang bereputasi baik. Perhatian khusus diberikan pada literatur kontemporer tentang kelincahan bisnis, adaptasi organisasi, dan ekonomi Islam, khususnya studi yang membahas kerangka kerja dan penerapan Maqasid al-Shariah. Tinjauan ini selanjutnya menggabungkan studi terbaru tentang perbankan Islam yang didukung AI, yang menyoroti perolehan efisiensi dan perlunya menyelaraskan penerapan teknologi dengan batasan etika Syariah [12]. Akibatnya, penelitian di masa depan harus menilai secara empiris bagaimana otomatisasi yang digerakkan oleh AI dan alat pendukung keputusan dapat dikalibrasi untuk memenuhi efisiensi operasional dan keharusan kepatuhan Syariah yang diidentifikasi dalam studi kasus perbankan Islam baru-baru ini [64].

Untuk analisis data, penelitian ini menerapkan analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk mengekstrak pola, tema, dan konsep yang berulang dari sumber yang dipilih, sementara analisis tematik membantu mengklasifikasikan temuan ke dalam kategori yang lebih luas yang selaras dengan tujuan penelitian ini. Proses analisis melibatkan tiga tahap utama: (1) reduksi data dengan meringkas dan mengkategorikan materi yang relevan, (2) tampilan data melalui tema terstruktur seperti kelincahan, etika, dan Maqasid, dan (3) penarikan kesimpulan untuk mensintesis bagaimana kelincahan bisnis dapat diselaraskan dengan Maqasid al-Shariah. Sintesis ini menggarisbawahi perlunya menanamkan kriteria etika yang berasal dari Maqasid dalam struktur tata kelola yang tangkas untuk mendorong ketahanan operasional dan keberlanjutan yang sesuai dengan Syariah [65].

Pendekatan metodologis ini memastikan bahwa temuan penelitian ini secara konseptual ketat dan relevan secara praktis, menawarkan landasan yang kokoh untuk mengembangkan

model bisnis yang etis dan adaptif yang sesuai untuk dinamika ekonomi global kontemporer. Akibatnya, pekerjaan di masa depan harus menguji secara empiris kerangka kerja yang diusulkan di berbagai sektor untuk memastikan kapasitasnya untuk secara bersamaan meningkatkan metrik kelincahan dan kinerja ESG yang sesuai dengan Maqasid, dengan memanfaatkan bukti analitik bisnis yang ditingkatkan dengan AI dan implementasi AI yang etis yang didokumentasikan dalam literatur terkini [66]. Validasi empiris semacam itu juga dapat mengeksplorasi indikator kelincahan khusus sektor untuk menyempurnakan kerangka kerja yang selaras dengan Maqasid yang diusulkan [67].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kelincahan Bisnis dalam Ketidakpastian Global

Pengamatan empiris menunjukkan bahwa analitik ESG yang ditingkatkan AI, ketika diatur oleh kerangka kerja etika yang kuat, memperkuat transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan—aset penting untuk mempertahankan kelincahan di tengah ketidakpastian pasar yang meningkat [68]. Temuan ini menggemakan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan yang digerakkan oleh AI secara nyata meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan organisasi di seluruh sektor keuangan, kesehatan, dan ritel [8]. Akibatnya, mengintegrasikan metrik ESG yang digerakkan oleh AI dalam tata kelola yang selaras dengan Maqasid tidak hanya memperkuat kemampuan beradaptasi sektoral tetapi juga memperkuat kepatuhan etika, sinergi yang tercermin dalam studi terbaru yang menghubungkan adopsi AI dengan peningkatan kinerja lingkungan dan sosial dan dengan hasil inklusi keuangan yang lebih luas dalam konteks FinTech Islam [69].

Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus memeriksa bagaimana analitik prediktif yang didukung AI dapat secara sistematis tertanam dalam putaran keputusan yang diturunkan dari Maqasid untuk lebih memperkuat kelincahan dan kinerja ESG yang sesuai dengan Syariah [2]. Investigasi longitudinal yang melacak intervensi ESG yang digerakkan oleh AI di berbagai lingkungan regulasi akan sangat penting untuk mengukur dampaknya terhadap ketahanan yang selaras dengan Maqasid dan penciptaan nilai yang berkelanjutan [4]. Akibatnya, investigasi longitudinal harus mengintegrasikan indikator kelincahan spesifik sektor yang menangkap dinamisme operasional dan hasil ESG yang selaras dengan Maqasid, memanfaatkan transparansi yang digerakkan oleh AI dan mekanisme akuntabilitas pemangku kepentingan yang disorot dalam studi tata kelola AI-ESG baru-baru ini dan inovasi fintech yang sesuai dengan Syariah.

Secara khusus, menggabungkan metrik kelincuhan yang digerakkan oleh AI ke dalam tata kelola berbasis Maqasid dapat memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi gangguan dan mengkonfigurasi ulang proses secara real time, sehingga memperkuat responsivitas kompetitif dan keberlanjutan yang sesuai dengan Syariah [70]. Integrasi tersebut dapat dioperasionalkan melalui kerangka kerja kapabilitas dinamis yang memadukan analitik data real time dengan titik pemeriksaan etika berbasis Maqasid, sehingga mengubah kelincuhan menjadi hasil yang selaras dengan Syariah yang terukur [71]. Menerapkan sistem kapabilitas dinamis tersebut juga dapat mengurangi tantangan kualitas data dengan mewajibkan jalur AI yang transparan dan sadar bias yang selaras dengan standar pengungkapan ESG dan keharusan etika Maqasid [24].

Studi terbaru mengkonfirmasi bahwa pelaporan ESG yang didukung AI tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan secara real - time tetapi juga menyelaraskan kelincuhan operasional dengan titik pemeriksaan etika yang diturunkan dari Maqasid, sehingga memperkuat kinerja dan kepatuhan [72]. Akibatnya, para akademisi didorong untuk mengembangkan metrik standar yang menangkap persimpangan transparansi ESG yang dimungkinkan oleh AI dan kelincuhan yang sesuai dengan Maqasid di seluruh rezim peraturan yang heterogen [44]. Kerangka kerja pelaporan ESG yang diperkuat AI yang terpadu, dikalibrasi dengan prinsip-prinsip Maqasid, oleh karena itu akan memfasilitasi perbandingan lintas yurisdiksi sambil menjaga integritas etika. Oleh karena itu, pekerjaan empiris di masa depan harus menguji kerangka kerja ini dengan menerapkan dasbor ESG yang digerakkan oleh AI yang menanamkan kriteria berbasis Maqasid untuk mengevaluasi kinerja di berbagai sektor. [73].

Selain itu, menggabungkan metrik persepsi pemangku kepentingan akan membantu memverifikasi bahwa dimensi etika yang didorong oleh Maqasid diakui sebagai kriteria yang kredibel dan bernilai tambah oleh investor dan regulator. Pilot empiris yang menanamkan dasbor ESG yang disempurnakan AI yang dikalibrasi dengan standar Maqasid telah menunjukkan janji dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memfasilitasi persetujuan regulasi [74]. Pilot skala besar berikutnya harus mengukur bagaimana dasbor ESG yang ditambah AI, dikalibrasi dengan kriteria Maqasid, memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan, arus investasi, dan kepatuhan regulasi di berbagai konteks pasar [75]. Akibatnya, menetapkan standar data yang dapat dioperasikan yang merekonsiliasi keluaran ESG yang dihasilkan AI dengan kriteria berbasis Maqasid akan menjadi penting untuk mencapai penerimaan regulasi lintas batas yang konsisten [35].

Keterbatasan Kelincahan Konvensional tanpa Jangkar Etika

Model ketangkasan konvensional, yang memprioritaskan kecepatan dan responsivitas di atas pertimbangan etika, berisiko mendorong praktik yang tidak berkelanjutan dan merusak kepercayaan pemangku kepentingan. Bukti empiris dari lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa mengintegrasikan indeks pengungkapan ESG yang selaras dengan Maqasid secara nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas etika, sehingga menangkal jebakan model ketangkasan yang didorong oleh kecepatan [38]. Oleh karena itu, mengintegrasikan analitik ESG yang didukung AI ke dalam protokol ketangkasan menyediakan perancah etika yang diperlukan untuk menyeimbangkan respons cepat dengan akuntabilitas berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus mengeksplorasi strategi mitigasi bias dalam jalur ESG yang didorong AI untuk memperkuat integritas etika tanpa mengorbankan kecepatan pengambilan keputusan yang gesit [76].

Untuk menyelaraskan respons cepat dengan ketelitian etika, para peneliti harus merancang jalur AI yang sadar bias yang menanamkan titik pemeriksaan tata kelola yang transparan sambil mempertahankan throughput analitis waktu nyata [30]. Menetapkan kotak pasir regulasi yang menguji jalur AI - ESG yang sadar bias dapat menyediakan lingkungan yang terkendali untuk menilai kepatuhan dan kinerja tanpa mengganggu kelangsungan operasional. [44]. Uji coba sandbox semacam itu juga dapat menghasilkan bukti empiris tentang bagaimana sistem AI - ESG yang sadar bias meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan ketahanan jangka panjang, yang selaras dengan tujuan Maqasid dan peningkatan kinerja ESG [44]. Eksperimen sandbox ini harus mengevaluasi lebih lanjut skalabilitas mekanisme mitigasi bias di berbagai lingkungan data untuk menjamin bahwa peningkatan kelincahan secara konsisten menegakkan standar etika yang sesuai dengan Syariah.

AI - ESG baru-baru ini menunjukkan bahwa jalur AI yang sadar bias yang digabungkan dengan dasbor yang selaras dengan Maqasid meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan, dengan demikian memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memfasilitasi pengesahan peraturan yang lebih lancar [30]. Akibatnya, menetapkan standar industri yang luas untuk jalur AI - ESG yang sadar bias akan menjadi penting untuk melembagakan kelincahan etika dan memastikan pengesahan peraturan yang konsisten di seluruh yurisdiksi. Dalam praktiknya, standar tersebut harus mengkodifikasi mekanisme transparansi AI dan protokol mitigasi bias yang diidentifikasi dalam literatur tata kelola AI - ESG baru-baru ini, dengan demikian memberikan peta jalan konkret bagi perusahaan untuk mencapai pelaporan yang akuntabel dan dapat dipercaya.

Standar kolaboratif harus mewajibkan audit pihak ketiga berkala atas model ESG yang digerakkan oleh AI untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria etika yang berasal dari Syariah dan praktik terbaik tata kelola AI yang muncul [30]. Dengan demikian, skema sertifikasi internasional untuk sistem AI - ESG yang sadar bias, diawasi oleh auditor independen, dapat melembagakan kepatuhan dan menandakan kredibilitas kepada investor dan regulator [41]. Sertifikasi semacam itu juga dapat memberi insentif kepada perusahaan untuk menanamkan siklus perbaikan berkelanjutan untuk kepatuhan AI - ESG, yang mendorong siklus kelincahan etika yang baik [77]. Kerangka kerja seperti itu juga akan memungkinkan pelacakan longitudinal atas hasil kepatuhan, dengan demikian menginformasikan penyempurnaan kebijakan dan memperkuat kepercayaan pasar.

Wawasan longitudinal ini selanjutnya dapat memandu kerangka kerja regulasi adaptif yang secara dinamis mengintegrasikan sinyal risiko AI yang muncul dengan metrik kepatuhan berbasis Maqasid. Menerapkan dasbor pemantauan waktu nyata yang menandai indikator risiko algoritmik yang muncul dan secara otomatis memetakannya ke ambang batas kepatuhan yang selaras dengan Maqasid dapat mengoperasionalkan pengawasan adaptif ini [46]. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan mekanisme peringatan waktu nyata yang interoperabel yang secara otomatis memicu tindakan korektif ketika metrik risiko algoritmik melanggar ambang batas Maqasid yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menanamkan tata kelola proaktif ke dalam struktur operasional sistem AI - ESG [78]. Oleh karena itu, investigasi di masa depan harus memeriksa penggabungan modul AI yang dapat dijelaskan ke dalam mesin peringatan untuk meningkatkan interpretabilitas pemangku kepentingan atas sinyal risiko sambil mempertahankan kemampuan korektif cepat dari lingkaran tata kelola yang selaras dengan Maqasid.

Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Kerja Kelincahan Etika

Dengan menanamkan tujuan - tujuan yang berasal dari Maqasid ke dalam loop keputusan yang didukung AI, perusahaan dapat secara bersamaan memenuhi keharusan etika Syariah dan siklus iterasi cepat yang dituntut oleh metodologi agile kontemporer [79]. Menerapkan loop AI yang selaras dengan Maqasid ini memerlukan titik pemeriksaan tata kelola yang transparan dan pemantauan bias yang berkelanjutan, sehingga menyelaraskan kepatuhan regulasi dengan akuntabilitas etika yang ditekankan dalam kerangka kerja tata kelola AI yang sedang berkembang [80]. Akibatnya, menggabungkan komponen - komponen AI yang dapat dijelaskan dalam loop yang selaras dengan Maqasid dapat meningkatkan interpretabilitas dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sambil mempertahankan kinerja agile [22].

Mengintegrasikan mekanisme umpan balik pemangku kepentingan yang sistematis ke dalam loop AI - ESG yang sadar bias mengatasi kesenjangan keterlibatan pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam audit etika AI kontemporer [81]. Menanamkan loop umpan balik seperti itu tidak hanya memenuhi prinsip Maqasid Masalah tetapi juga mengoperasionalkan kerangka etika berbasis kebajikan yang dianjurkan untuk tata kelola AI dalam beasiswa Islam [22]. Akibatnya, kolaborasi interdisipliner antara ahli etika AI, ahli hukum Islam, dan praktisi industri sangat penting untuk merumuskan kerangka kerja tata kelola AI yang komprehensif dan sesuai halal yang menanamkan prinsip-prinsip Maqasid di seluruh siklus hidup AI [19]. Validasi empiris dari kerangka kerja interdisipliner tersebut harus mengukur bagaimana penilaian Masalah yang difasilitasi AI yang dapat dijelaskan memengaruhi skor kepatuhan Syariah dan throughput yang gesit di seluruh konteks industri [21].

Studi empiris seperti itu juga harus menangkap bagaimana umpan balik yang didorong oleh Masalah meningkatkan metrik kepatuhan dan inovasi. Akibatnya, eksperimen lapangan longitudinal yang melakukan triangulasi hasil Masalah yang dipersepsikan oleh pemangku kepentingan dengan ESG objektif dan KPI ketangkasan diperlukan untuk memvalidasi secara empiris dampak kausal dari umpan balik yang didorong oleh Masalah pada kinerja, dengan demikian mengoperasionalkan kerangka kerja Maqasid dalam praktik [28]. Jalan yang menjanjikan adalah membangun model evaluasi hibrida yang mengintegrasikan indeks kepatuhan yang diturunkan dari Maqasid dengan dasbor bias AI dinamis, yang memungkinkan pengukuran simultan kesesuaian etika dan throughput tangkas dalam penerapan waktu nyata [9]. Penelitian di masa depan juga harus mengeksplorasi bagaimana mengintegrasikan indeks kepatuhan yang diturunkan dari Maqasid dengan dasbor bias AI memengaruhi hasil ESG dan kecepatan sprint dalam tim tangkas.

Dengan demikian, investigasi interdisipliner yang akan datang harus mengukur bagaimana dasbor bias yang diinformasikan Maqasid memodulasi kinerja ESG dan efisiensi sprint tangkas, memperluas kerangka kerja mitigasi risiko AI - ESG yang diuraikan dalam literatur terbaru. Dengan memunculkan metrik bias bersama indikator yang berasal dari Maqasid, dasbor ini dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, menggemakan seruan untuk tata kelola AI yang dapat dijelaskan dalam literatur [48]. Oleh karena itu, pekerjaan di masa depan harus mengembangkan protokol audit terintegrasi yang menggabungkan metrik AI yang dapat dijelaskan dengan daftar pemeriksaan kepatuhan Syariah untuk menyediakan regulator dengan kerangka kerja penilaian terpadu [33].

API standar yang mengalirkan skor keterjelasan waktu nyata dan bendera kepatuhan yang diturunkan dari Maqasid ke dasbor regulasi akan mengoperasionalkan protokol terpadu ini [27]. Antarmuka seperti itu juga dapat memungkinkan pencatatan kepatuhan otomatis, memfasilitasi verifikasi pihak ketiga berkala dan peningkatan berkelanjutan dari metrik kinerja etika dan tangkas. Akibatnya, menetapkan standar pelaporan transparansi wajib yang menangkap skor keterjelasan waktu nyata bersama bendera kepatuhan yang diturunkan dari Maqasid akan memberikan regulator wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pengawasan berkelanjutan [30]. Mengadopsi protokol pelaporan terpadu seperti itu juga akan memfasilitasi perbandingan lintas yurisdiksi dari kinerja AI yang selaras dengan Maqasid, sehingga mempercepat difusi praktik tangkas yang sesuai halal di seluruh dunia [34].

Sinergi antara Kelincahan Bisnis dan Maqashid untuk Keunggulan Kompetitif

Dengan memanfaatkan proses tangkas yang selaras dengan Maqasid yang menggabungkan analitik ESG secara real - time dengan kontrol AI yang sadar bias dan dapat dijelaskan, perusahaan dapat menciptakan proposisi nilai yang khas yang secara bersamaan memenuhi keharusan etika Syariah dan mempercepat respons pasar, sehingga mengamankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan [82]. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa mengintegrasikan Islam Solusi FinTech dalam alur kerja tangkas yang selaras dengan Maqasid memperkuat inklusi keuangan dan kesetaraan gender, yang selanjutnya membedakan perusahaan di pasar negara berkembang [83]. Oleh karena itu, menanamkan sistem keuangan Islam FinTech dalam jaringan agile yang selaras dengan Maqasid dapat secara simultan memajukan hasil ESG — dengan mengarahkan layanan keuangan menuju pembangunan masyarakat dan tujuan pengurangan kemiskinan — dan mempertajam hubungan antara agile dan kinerja yang penting untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan [84].

Mengantisipasi mandat regulasi mendatang yang membutuhkan transparansi yang didorong oleh XAI, perusahaan yang melembagakan dasbor bias yang selaras dengan Maqasid siap untuk mengubah biaya kepatuhan menjadi pembeda strategis, sehingga memperkuat kepemimpinan pasar mereka [53]. Kepercayaan yang meningkat ini kemungkinan akan menarik investasi pelanggan yang lebih besar, yang mencerminkan temuan bahwa peringkat kualitas kepatuhan Syariah sangat penting untuk membangun kepercayaan klien [85]. Akibatnya, mengembangkan skema pelaporan XAI standar yang menanamkan penanda kepatuhan yang berasal dari Maqasid akan memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kinerja etika yang dapat diverifikasi sambil menyederhanakan proses audit.

Menerapkan skema pelaporan yang ditingkatkan XAI seperti itu juga akan memenuhi standar transparansi yang diamanatkan regulator yang baru, seperti yang disorot dalam

kerangka kerja tata kelola AI-keuangan baru-baru ini [13]. Skema pelaporan yang ditingkatkan XAI seperti itu harus menggabungkan skor keterjelasan waktu nyata di samping bendera kepatuhan yang berasal dari Maqasid untuk memenuhi harapan etika dan peraturan. Skema seperti itu juga harus memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap penyimpangan kepatuhan, yang memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menyesuaikan model AI dan menjaga keselarasan dengan tujuan Maqasid di seluruh siklus hidup produk. Oleh karena itu, platform masa depan harus menanamkan mekanisme deteksi penyimpangan otomatis yang memicu evaluasi ulang kepatuhan Maqasid waktu nyata setiap kali kinerja model menyimpang, dengan demikian memastikan keselarasan etika yang berkelanjutan [12].

Mengintegrasikan log audit abadi berbasis blockchain dengan dasbor XAI ini dapat lebih menjamin ketertelusuran keputusan kepatuhan Maqasid di seluruh pembaruan model, memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Asal usul yang berlabuh di blockchain seperti itu tidak hanya memperkuat auditabilitas tetapi juga selaras dengan harapan peraturan yang muncul untuk tata kelola AI yang transparan. Akibatnya, perusahaan yang mengadopsi kerangka kerja XAI yang terhubung dengan blockchain ini dapat memperoleh sertifikasi kepatuhan waktu nyata, yang secara bersamaan memuaskan auditor Syariah dan regulator sekuler [53]. Dengan demikian, penerapan dasbor XAI yang berlabuh di blockchain tidak hanya memenuhi mandat transparansi hukum yang muncul tetapi juga menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi yang selaras dengan standar etika Syariah dan persyaratan pengungkapan yang ketat yang diuraikan dalam undang-undang tata kelola AI kontemporer [86].

Dengan menanamkan dasbor XAI yang ditambahkan pada blockchain, perusahaan tidak hanya memenuhi mandat transparansi hukum yang muncul tetapi juga secara konkret meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan, menggemakan keharusan untuk tata kelola AI yang dapat dijelaskan yang diartikulasikan dalam studi terbaru [43]. Penelitian di masa depan harus mengevaluasi secara empiris bagaimana dasbor XAI yang ditambahkan pada blockchain memengaruhi latensi audit dan kepercayaan pemangku kepentingan di seluruh yurisdiksi, memanfaatkan kerangka kerja transparansi XAI dan metodologi audit blockchain yang diidentifikasi dalam literatur terbaru [87]. Oleh karena itu, penilaian empiris dari dasbor XAI yang ditambahkan pada blockchain harus berfokus pada dampaknya terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan akuntabilitas yang dirasakan, yang mencerminkan kebutuhan yang terdokumentasi untuk transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan yang digerakkan oleh AI.

Menuju Model Konseptual Kelincahan yang Sesuai Syariah

Model yang diusulkan mengintegrasikan metrik keterjelasan waktu nyata, jejak audit yang ditambahkan blockchain, dan indikator kepatuhan yang diturunkan dari Maqasid untuk menciptakan kerangka kerja terpadu yang secara bersamaan memenuhi mandat etika Syariah dan persyaratan transparansi tata kelola AI kontemporer [88]. Model ini mengoperasionalkan panggilan untuk AI yang dapat dijelaskan dengan menanamkan skor keterjelasan waktu nyata yang memenuhi tuntutan peraturan untuk transparansi dan keharusan etika yang didorong oleh Maqasid. Validasi empiris di masa depan harus menggunakan studi kasus fintech longitudinal untuk mengukur peningkatan kepercayaan dan mitigasi penyimpangan kepatuhan yang dicapai oleh kerangka kerja XAI - blockchain terintegrasi [89].

Validasi empiris model ini dapat memanfaatkan metrik transparansi yang digerakkan oleh XAI yang terbukti meningkatkan akuntabilitas dalam sistem AI keuangan, sehingga memberikan bukti kuat tentang kemanjurannya [39]. Penelitian selanjutnya harus melakukan studi kasus komparatif lintas yurisdiksi yang mengukur dampak skor transparansi XAI waktu nyata terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan efisiensi audit, sehingga menjelaskan skalabilitas kerangka kerja yang selaras dengan Maqāshid yang diusulkan di berbagai lingkungan peraturan [90]. Selain itu, tinjauan sistematis mengonfirmasi bahwa metrik transparansi yang digerakkan oleh XAI secara substansial memperkuat akuntabilitas dalam aplikasi AI keuangan yang diatur, menggarisbawahi kesesuaiannya untuk memvalidasi kerangka kerja yang selaras dengan Maqāshid yang diusulkan.

Oleh karena itu, agenda metode campuran yang menggabungkan analisis kasus longitudinal dengan pemantauan kinerja XAI kuantitatif direkomendasikan untuk menangkap dampak etis dan keuntungan operasional dari arsitektur blockchain - XAI terintegrasi. Menerapkan agenda metode campuran ini akan memungkinkan para peneliti untuk melakukan triangulasi indikator kinerja XAI kuantitatif dengan narasi pemangku kepentingan kualitatif, sehingga menghasilkan basis bukti yang komprehensif untuk menyempurnakan kebijakan regulasi dan praktik tangkas yang selaras dengan Maqasid [86]. Triangulasi semacam itu dapat memandu terciptanya kotak pasir regulasi adaptif yang mengakomodasi kepatuhan Maqasid yang dinamis sambil mendorong inovasi fintech [91].

Operator sandbox dapat mengintegrasikan dasbor XAI otomatis untuk mensimulasikan skenario yang sesuai dengan Maqasid, memungkinkan iterasi produk fintech yang cepat sambil terus memantau metrik risiko etika [92]. Lingkungan sandbox tersebut juga harus menyertakan peringatan deteksi drift otomatis yang menandakan setiap deviasi dari ambang batas yang diturunkan oleh Maqasid, yang memungkinkan kalibrasi ulang model proaktif dan kepatuhan

etika yang berkelanjutan. Uji coba sandbox awal menunjukkan bahwa penyematan dasbor XAI bersama dengan asal-usul blockchain dapat secara signifikan mempersingkat siklus audit sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kepatuhan Maqasid. [93]. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk mengkodifikasi prototipe blockchain XAI berbasis sandbox ini sebagai alat kepatuhan standar dalam regulasi fintech yang sejalan dengan Syariah [94].

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus memformalkan prototipe blockchain XAI berbasis sandbox sebagai instrumen kepatuhan wajib, sehingga melembagakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diperjuangkan dalam beasiswa etika AI dan regulasi terkini [95]. Dengan demikian, regulator harus mengeluarkan pedoman implementasi terperinci yang mengamankan integrasi dasbor XAI dan asal usul blockchain ke dalam semua layanan keuangan berbasis AI, sehingga mengoperasionalkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disorot dalam literatur etika AI kontemporer [96]. Mandat semacam itu juga akan memberi insentif kepada perusahaan fintech untuk berinvestasi dalam standar yang dapat dioperasikan untuk asal usul data yang selaras dengan Maqasid, yang mendorong konvergensi di seluruh industri pada praktik AI yang etis [97].

Oleh karena itu, regulator harus mengadakan forum multi - pemangku kepentingan yang menyelaraskan standar-standar yang berpusat pada Syariah dengan pedoman etika AI yang baru untuk memastikan implementasi solusi fintech yang transparan dan akuntabel yang konsisten di seluruh yurisdiksi [98]. Untuk mengoperasionalkan harmonisasi ini, rangkaian metrik transparansi AI yang selaras dengan Maqasid harus dibuat bersama oleh regulator, ulama Syariah, dan teknolog industri, yang memungkinkan evaluasi yang konsisten terhadap kepatuhan etika di seluruh yurisdiksi [99]. Rangkaian metrik tersebut juga akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk produk-produk keuangan yang digerakkan oleh AI, yang memungkinkan audit berkala dan memperkuat kepercayaan investor terhadap inovasi-inovasi yang sesuai dengan Syariah. [74]. Oleh karena itu, kerangka kebijakan yang akan datang harus mewajibkan pengungkapan kepada publik skor kepatuhan yang diperoleh dari XAI, yang memungkinkan pengawasan berkelanjutan dan memfasilitasi penyelarasan regulasi lintas negara terhadap solusi fintech yang sesuai dengan Syariah [100].

5. PERBANDINGAN

Diskusi berikut ini mensintesis bagaimana integrasi XAI - blockchain memajukan kelincahan yang selaras dengan Maqasid sambil memenuhi tuntutan regulasi yang muncul untuk transparansi dan akuntabilitas dalam fintech. [101]. Temuan empiris menunjukkan

bahwa mengintegrasikan dasbor XAI real - time dengan asal-usul blockchain tidak hanya memenuhi mandat transparansi regulasi, tetapi juga secara material meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi risiko terkait kepatuhan [102]. Hasil ini menguatkan seruan sebelumnya untuk kerangka kerja regulasi yang adaptif dan berbasis dialog yang menggabungkan transparansi XAI real - time dengan asal-usul blockchain untuk mempertahankan kepatuhan etis dalam ekosistem fintech yang dinamis.

Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus memeriksa operasionalisasi rangkaian metrik XAI - blockchain yang diusulkan di seluruh lanskap regulasi yang heterogen untuk lebih memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas dalam fintech yang selaras dengan Syariah [103]. Penyelarasan ini menggemakan temuan sektoral baru-baru ini bahwa lembaga keuangan yang mengadopsi AI yang dapat dijelaskan dan asal-usul blockchain mengalami transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih tinggi [66]. Akibatnya, percontohan lintas yurisdiksi longitudinal yang menanamkan rangkaian metrik XAI - blockchain dalam sandbox regulasi adaptif sangat penting untuk memvalidasi secara empiris kapasitasnya untuk mempertahankan kelincahan yang selaras dengan Maqasid dalam skala besar. Selain itu, menanamkan lokakarya desain bersama pemangku kepentingan dalam percontohan ini dapat memastikan bahwa metrik XAI - blockchain yang berkembang tetap beresonansi secara budaya dan berlandaskan etika [39].

Selain itu, penyertaan lokakarya desain bersama dapat meningkatkan kualitas dan asal data, sehingga memperkuat keandalan penjelasan XAI dan mendukung keharusan etis yang disorot dalam penelitian integrasi AI - keuangan. Akibatnya, penyertaan putaran umpan balik pemangku kepentingan yang berkelanjutan dalam kerangka kerja XAI - blockchain akan memungkinkan penyempurnaan dinamis metrik yang selaras dengan Maqasid dan mempertahankan kepatuhan etis jangka panjang dalam ekosistem fintech [104]. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus melembagakan pelaporan publik berkala atas metrik yang didorong oleh umpan balik ini untuk memperkuat akuntabilitas dan menyelaraskan dengan standar etika - AI yang muncul di sektor keuangan [92].

Oleh karena itu, revisi kebijakan di masa depan harus mewajibkan audit pihak ketiga berkala atas implementasi XAI - blockchain untuk memverifikasi kepatuhan terhadap tujuan Maqasid dan kriteria etika - AI kontemporer [105]. Audit independen tersebut harus menggabungkan metrik kinerja XAI dan log asal-usul blockchain untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari Maqasid tetap dapat diverifikasi dan selaras dengan keharusan transparansi yang diidentifikasi dalam kajian AI - ESG terkini [30]. Sejalan dengan wawasan ini, regulator juga harus mewajibkan verifikasi pihak ketiga berkala atas penyimpangan model

AI dan integritas blockchain untuk memastikan keselarasan yang berkelanjutan dengan tujuan ESG dan Maqasid. [106]. Menerapkan kerangka audit terpadu yang melakukan referensi silang skor interpretabilitas XAI dengan jejak blockchain yang tidak dapat diubah akan lebih menjamin bahwa produk keuangan yang digerakkan oleh AI akan terus memenuhi keharusan ESG dan standar etika yang berasal dari Maqasid [30].

Audit semacam itu juga harus mengevaluasi langkah-langkah mitigasi bias algoritmik untuk memastikan keluaran XAI tidak melanggengkan ketidakadilan, yang mencerminkan keharusan deteksi bias yang disorot dalam literatur AI - keuangan terkini [107]. Dengan demikian, regulator harus mengharuskan auditor pihak ketiga untuk mensertifikasi skor interpretabilitas XAI dan catatan asal-usul blockchain terhadap standar mitigasi bias yang diuraikan dalam kerangka kerja tata kelola AI - keuangan kontemporer [49]. Untuk mengoperasionalkan ini, auditor harus menggunakan protokol deteksi bias berkelanjutan yang didasarkan pada metode AI yang dapat dijelaskan, sehingga memastikan bahwa keluaran model tetap adil dari waktu ke waktu [42]. Pengungkapan publik rutin atas metrik mitigasi bias bersama dengan dasbor asal-usul blockchain akan memperdalam akuntabilitas yang selaras dengan Maqasid dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap solusi fintech yang sesuai dengan Syariah.

Menetapkan badan sertifikasi yang berdedikasi dan selaras dengan Maqasid akan semakin melembagakan praktik audit ini dan memberikan jaminan kepatuhan etika yang terpercaya bagi para pelaku pasar. Badan seperti itu harus menerbitkan laporan audit berkala yang menggabungkan skor interpretabilitas XAI dengan catatan asal-usul blockchain yang tidak dapat diubah, sehingga mengoperasionalkan mekanisme pengawasan pihak ketiga yang penting untuk keuangan berbasis AI yang transparan dan akuntabel [108]. Untuk memastikan kesesuaian yang ketat, badan sertifikasi harus mengadopsi kerangka kerja audit algoritmik enam poin — audit independen, pemberitahuan pemangku kepentingan, pengungkapan temuan, pelaporan insiden bahaya, keterlibatan pemangku kepentingan langsung, dan akreditasi auditor — sambil menyelaraskannya dengan pedoman audit Syariah yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk fintech XAI - blockchain secara konsisten memenuhi tujuan Maqasid dan kriteria etika AI kontemporer [109].

Rezim sertifikasi ini sejajar dengan kerangka kerja audit AI yang muncul yang menggabungkan verifikasi independen dengan pemberitahuan pemangku kepentingan untuk menegakkan kepercayaan dan keadilan dalam keuangan algoritmik [110]. Dengan melembagakan sertifikasi yang selaras dengan Maqasid ini, regulator dapat secara bersamaan memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk akuntabilitas AI yang dapat dijelaskan

dan mitigasi bias sistematis, sehingga memperkuat kepatuhan etis dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penilaian dampak tahunan badan tersebut harus mengukur bagaimana kepatuhan XAI - blockchain yang selaras dengan Maqasid diterjemahkan menjadi peningkatan ESG yang dapat diamati, memberikan regulator dan investor dengan bukti kinerja yang konkret [111].

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari perspektif akademis, studi ini memperkaya wacana teoretis dengan menjembatani konsep kelincahan bisnis modern dengan kerangka etika Maqasid al-Syariah. Meskipun literatur yang ada tentang kelincahan berfokus terutama pada kemampuan beradaptasi, daya tanggap, dan daya saing, perhatian terbatas diberikan pada keselarasannya dengan prinsip-prinsip etika Islam. Integrasi yang diusulkan memberikan kontribusi konseptual baru yang tidak hanya memperluas studi organisasi tetapi juga memajukan pemikiran ekonomi Islam, membuka jalur bagi penelitian empiris di masa mendatang tentang efektivitas kelincahan yang sesuai dengan Syariah di berbagai industri.

Secara praktis, temuan ini menawarkan wawasan berharga bagi perusahaan Islam yang beroperasi di pasar yang sangat volatil. Dengan mengintegrasikan Maqasid ke dalam praktik-praktik yang gesit, organisasi dapat menerapkan transformasi digital, memperkuat respons rantai pasok, dan mendorong inovasi sekaligus memastikan kepatuhan Syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan operasional tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, kegesitan yang berorientasi pada nilai menjadi aset strategis yang memungkinkan bisnis Islam untuk membedakan diri di pasar global, menyeimbangkan profitabilitas dengan akuntabilitas etis.

Dari sudut pandang kebijakan, studi ini menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi dan kelembagaan yang suportif yang memungkinkan kelincahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk berkembang. Para pembuat kebijakan didorong untuk merancang pedoman yang mendorong inovasi teknologi sekaligus menjaga prinsip-prinsip Syariah, khususnya bagi UKM dan lembaga keuangan Islam. Memfasilitasi akses ke infrastruktur digital, mendorong kolaborasi industri-akademisi, dan mendorong mekanisme regulasi yang inklusif akan memperkuat ketahanan ekonomi Islam. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat memposisikan perusahaan-perusahaan Islam sebagai pemimpin global dalam mempromosikan model bisnis yang etis, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Achimugu, D., Ukatu, C., & Anaeye, A. E. (2025). Sustainability in financial reporting: The role of AI-powered predictive analytics. *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 4(3), 53–70. <https://doi.org/10.54536/ajmri.v4i3.4551>
- Agu, E. E., Abhulimen, A. O., Obiki-Osafiele, A. N., Osundare, O. S., Adeniran, I. A., & Efunniyi, C. P. (2024). Leveraging AI-powered predictive analytics to reduce credit risk and enhance financial inclusion. *International Journal of Finance Research and Management Studies*, 3(2), 20–29. <https://doi.org/10.56355/ijfrms.2024.3.2.0026>
- Ahmed, F., Ahmed, M. R., Kabir, M. A., & Islam, M. M. (2025). Merevolusi analisis bisnis: Dampak kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. 1(1), 147–173. <https://doi.org/10.63125/f7yjsxw69>
- Akula, R., & Garibay, I. (2021). AI algorithm audit and assurance: A framework for ensuring ethical AI algorithmic practices. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.14046>
- AlFzari, S. M. A. A., Rosman, A. S., Bayoumi, K. A., & Darawi, A. B. S. (2024). Shariah compliance in fintech application solutions: An Islamic legal perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i11/23169>
- Alfzari, S., Al-Shboul, M., & Alshurideh, M. T. (2025). Predictive analytics in portfolio management: Integrating AI and investment economics for optimal risk–return tradeoff. *International Review of Management and Marketing*, 15(2), 365–380. <https://doi.org/10.32479/irmm.18594>
- Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). A conceptual framework of factors of Shariah internal audit effectiveness in Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 171–193. <https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0097>
- Alonso, M. N. I., & Chatzianastasiou, F. S. (2024). The case for AI regulation in the financial industry. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4831147>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Alwi, S. F. S., Halim, F. A., Mazlin, T., Kadir, A. H. A., Hassan, R., & Fikri, A. A. H. S. (2021). Menelaah Maqasid al-Shariah di bank Islam: Sebelum dan sesudah implementasi intermediasi berbasis nilai. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 11(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10822>
- Alziyadat, N., & Ahmed, H. (2018). Pengambilan keputusan etis di lembaga keuangan Islam berdasarkan Maqasid al-Syariah: Kerangka konseptual. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 707–718. <https://doi.org/10.1002/tie.22025>
- Anang, A. N., Ajewumi, O. E., Sonubi, T., Nwafor, K. C., Arogundade, J. B., & Akinbi, I. J. (2024). Explainable AI in financial technology: Balancing innovation with regulatory compliance. *International Journal of Scientific Research Archive*, 13(1), 1793–1806. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.13.1.1870>
- Antwi, B. O., Adelakun, B. O., & Eziefule, A. O. (2024). Transforming financial reporting with AI: Enhancing accuracy and timeliness. *International Journal of Advanced Economics*, 6(6), 205–223. <https://doi.org/10.51594/ijae.v6i6.1229>

- Artene, A. E., Domil, A. E., & Ivaşcu, L. (2024). Unlocking business value: Integrating AI-based decision-making in financial reporting systems. *Electronics*, 13(15), 3069. <https://doi.org/10.3390/electronics13153069>
- Aulia, R., Fandini, S. I., Fauzi, R. N., & Maulana, R. (2024). Pentingnya etika bisnis syariah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang toleran dan damai. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i3.5447>
- Awad, A., Akola, O. A. Y., Amer, M. E., & Mousa, E. K. A. (2025). Artificial intelligence in financial reporting: Improving accuracy, compliance, and firm performance. *International Journal of Innovative Research in Science Studies*, 8(2), 361–374. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5166>
- Aysan, A. F., Çiftler, B. S., & Ünal, İ. M. (2024). Kekuatan prediktif hutan acak dalam menganalisis manajemen risiko di perbankan Islam. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 104. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030104>
- Badmus, O., Rajput, S., Arogundade, J. B., & Williams, M. H. (2024). AI-driven business analytics and decision-making. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(1), 616–633. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.1.3093>
- Bandura, A. (1997). Editorial. *American Journal of Health Promotion*, 12(1), 8–10. <https://doi.org/10.4278/0890-1171-12.1.8>
- Bell, A., Nov, O., & Stoyanovich, J. (2023). Think stakeholders first! Toward an algorithmic transparency playbook for regulatory compliance. *Data & Policy*, 5. <https://doi.org/10.1017/dap.2023.8>
- Bianchi, M., & Brière, M. (2021). Robo-advising: Less AI and more XAI? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3825110>
- Brock, D. C. (2018). Learning from the previous AI boom: A history of expert systems. *AI Magazine*, 39(3), 3–15. <https://doi.org/10.1609/aimag.v39i3.2809>
- Bussmann, N., Giudici, P., Tanda, A., & Yu, E. P. (2025). Explainable machine learning to predict cost of capital. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1578190>
- Calderón, E. P., Alrahamneh, S., & Montero, P. M. (2025). The impact of artificial intelligence on auditing: Insights from Jordanian professionals. *Discover Sustainability*, 6(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01058-3>
- Camilleri, M. A. (2024). AI governance: Ethical considerations and social responsibility implications. *Expert Systems*, 41(7). <https://doi.org/10.1111/exsy.13406>
- Černevičienė, J., & Kabašinskas, A. (2024). Explainable artificial intelligence (XAI) in finance: A systematic literature review. *Artificial Intelligence Review*, 57(8). <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10854-8>
- Challoumis, C. (2024). Memanfaatkan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan – Panduan.
- Chen, J., & Storchan, V. (2021). Seven challenges for aligning explanation requirements. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.05390>
- Cheong, C. W. H. (2020). Risiko, ketahanan, dan kepatuhan syariah. *Research in International Business and Finance*, 55, 101313. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101313>

- Chowdhury, S., et al. (2022). Unlocking the value of artificial intelligence in human resource management through an AI capability framework. *Human Resource Management Review*, 33(1), 100899. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2022.100899>
- Comunello, F., Martire, F., Sabetta, L., & Serpe, R. T. (2022). What people leave behind: Traces, footprints, and their relevance in knowledge societies.
- Costanza-Chock, S., Raji, I. D., & Buolamwini, J. (2022). Who audits the auditors? Recommendations from a field scan of the algorithmic auditing ecosystem. In *ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1571–1583). <https://doi.org/10.1145/3531146.3533213>
- de Castro Vieira, J. R., Barboza, F., Cajueiro, D. O., & Kimura, H. (2025). Toward fair AI: Reducing bias in credit decisions—A systematic literature review. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 228. <https://doi.org/10.3390/jrfm18050228>
- Elmahjub, E. (2023). Kecerdasan buatan (AI) dalam etika Islam: Menuju tolok ukur etika pluralis untuk AI. *Philosophy & Technology*, 36(4). <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Ema, A., Sato, R., Hase, T., Nakano, M., Kamimura, S., & Kitamura, H. (2023). Advancing AI auditing to improve AI governance. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.00044>
- Fadhli, S., Wiryanto, F. S., & Husna, M. (2023). Urgensi dan peran strategis Maqasid Syariah dan masalah dalam menanggapi tantangan hukum dan ekonomi bisnis Muslim. *Deleted Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.158>
- Ginena, K. (2013). Risiko syariah dan tata kelola perusahaan bank Islam. *Corporate Governance*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/cg-03-2013-0038>
- Göktaş, P., & Grzybowski, A. (2025). Shaping the future of healthcare: Ethical clinical challenges and pathways toward trustworthy AI. *Journal of Clinical Medicine*, 14(5), 1605. <https://doi.org/10.3390/jcm14051605>
- Güney, N. (2024). Maqasid al-Sharia dalam keuangan Islam: Analisis kritis wacana modern. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hacker, P., & Passoth, J.-H. (2022). Legal explainability of AI: From GDPR to AIA and beyond. In *Lecture Notes in Computer Science* (pp. 343–373). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04083-2_17
- Hamadou, I., Yumna, A., Hamadou, H., & Jallow, M. S. (2024). Memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan dalam perbankan Islam: Studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). *Modern Finance*, 2(1), 131–144. <https://doi.org/10.61351/mf.v2i1.116>
- Han, X., Xiao, S., Sheng, J., & Zhang, G. (2024). Enhancing efficiency and decision-making in higher education through smart commercial integration using AI. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01868-2>
- Hanif, M. (2018). Shari'ah compliance rating of Islamic financial services industry: A quantitative approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 162–184. <https://doi.org/10.1108/ijif-10-2017-0038>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Alahmadi, H. A. (2020). Inklusi teknologi keuangan di bank Islam: Implikasinya terhadap jaminan kepatuhan syariah. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(14). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i14/7361>

- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religiosity assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management & Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonisation and construction of an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/ijif-01-2018-0003>
- Ibrahim, A. S., & Tijjani, T. S. (2024). Islamic corporate social responsibility ethical compass: A pathway to sustainable impact. In *IntechOpen eBooks*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1005405>
- Järveläinen, J., Dang, D., Mekkanen, M., & Vartiainen, T. (2025). Menuju kerangka kerja untuk meningkatkan ketahanan keamanan siber infrastruktur penting terhadap ancaman siber: Pendekatan kemampuan dinamis. *Journal of Decision Systems*, 34(1). <https://doi.org/10.1080/12460125.2025.2479546>
- Jatmiko, W., Iqbal, A., & Ebrahim, M. S. (2023). Tentang etika model bisnis bank Islam. *British Journal of Management*, 35(1), 115–136. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12703>
- John, A., & Ahsun, A. (2025). Explainable AI (XAI) for fraud detection: Building trust and transparency in AI-based financial security systems. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5285281>
- Jun, X. (2024). *AI in ESG for financial institutions: An industry survey*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4949354>
- Karim, S., Naeem, M. A., & Abaji, E. E. (2022). Is Islamic FinTech coherent with Islamic banking? Stakeholder perspectives during COVID-19. *Heliyon*, 8(9), e10485. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10485>
- Kismawadi, E. R. (2024). Islamic FinTech: Navigating regulatory frameworks and promoting financial inclusion in GCC countries. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-02-2023-0061>
- Koswara, A., & Herlina, L. (2025). Penyimpangan etika AI dalam praktik pemasaran: Tinjauan kritis dari perspektif halal. <https://doi.org/10.58777/rie.v2i2.393>
- Kuiper, O. X., van den Berg, M., van der Burgt, J., & Leijnen, S. (2022). Exploring explainable AI in the financial sector: Perspectives of banks and supervisory authorities. In *Communications in Computer and Information Science* (pp. 105–119). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93842-0_6
- Kumar, S., Sharma, D., Rao, S., Lim, W. M., & Mangla, S. K. (2022). Past, present, and future of sustainable finance: Insights from big data analytics via machine learning research. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04410-8>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Mengembangkan keuangan Islam dalam rangka Maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2013-0057>
- Langer, M., Baum, K., Hartmann, K., Hessel, S., Speith, T., & Wahl, J. (2021). Explanation auditing for intelligent systems: A rationale for a multidisciplinary perspective. In *2021 IEEE Conference on Requirements Engineering Workshops* (pp. 164–168). <https://doi.org/10.1109/REW53955.2021.00030>

- Lehn, K. (2021). Tata kelola perusahaan dan kelincahan perusahaan. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101929. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101929>
- Leocádio, D., Malheiro, L., & Reis, J. (2024). Artificial intelligence in auditing: A conceptual framework for audit practice. *Administrative Sciences*, 14(10), 238. <https://doi.org/10.3390/admsci14100238>
- Li, N., Kim, M., Dai, J., & Vasarhelyi, M. A. (2024). Using artificial intelligence in ESG assurance. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 21(2), 83–99. <https://doi.org/10.2308/jeta-2022-054>
- Lim, T. (2024). Environmental, social, and governance (ESG) and artificial intelligence in finance: Summary of literature and state-of-the-art review. *Artificial Intelligence Review*, 57(4). <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10708-3>
- Liu, L., Wang, X., Tang, L., Sun, Z., & Wang, X. H. (2025). Exploring conditional ESG benefits of AI adoption: The role of learning capability, digital TMT, and operational slack. *Systems*, 13(6), 399. <https://doi.org/10.3390/systems13060399>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2019). Kerangka augmented tujuan etis tinggi (Maqasid al-Shari'ah) untuk bank Islam: Menilai kinerja etis dan menjelajahi faktor penentunya. *Journal of Business Ethics*, 170, 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mirishli, S. (2025). The role of legal frameworks in shaping ethical AI use in corporate governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5168616>
- Mohamed, H. A., & Otake, T. (2025). The role of Islamic FinTech in digital financial inclusion and sustainable development post-COVID-19: A cross-country analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-02-2024-0100>
- Mohamed, H., & Yıldırım, R. (2021). RegTech and regulatory change management for financial institutions. In *Studies in Computational Intelligence* (pp. 153–168). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62796-6_8
- Mohsin, M. T., & Nasim, N. B. (2025). Explaining the inexplicable: A systematic review of explainable AI in finance. <https://doi.org/10.32388/puo5ck>
- Muftah, M. A. R. A. (2022). The impact of artificial intelligence on auditing practice and financial reporting accuracy. *Integritas*, 2(1), 40–46. <https://doi.org/10.55544/ijrah.2.1.49>
- Muhamat, A. A., Zulkifli, A. F., Sulaiman, S., Subramaniam, G., & Mohamad, S. (2021). Perkembangan analisis biaya dan manfaat sosial (SCBA) dalam kerangka Maqasid Syariah: Narasi penggunaan drone untuk operator takaful. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(8), 387. <https://doi.org/10.3390/jrfm14080387>
- Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance dan kinerja berdasarkan indeks Maqasid Syariah: Studi di Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 24(2), 114–126. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2>
- Mukhlisin, M. (2020). The level of Maqāsid al-Shari'ah in financial reporting standards for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 60–77. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090>

- Murikah, W., Nthenge, J. K., & Musyoka, F. M. (2024). Bias and ethics of AI systems applied in auditing: A systematic review. *Scientific African*, e02281. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02281>
- Nemteanu, I., Mancebo, A., Joe, L., Lopez, R., Lopez, P., & Pettine, W. W. (2025). SAFE-AI practical framework for SMEs developing ethical medical AI policies. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.01304>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic literature review of Shariah governance mechanisms and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 27(2), 91–123. <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013>
- Odeyemi, O., Mhlongo, N. Z., Nwankwo, E. E., & Soyombo, O. T. (2024). Reviewing the role of AI in fraud detection and prevention in financial services. *International Journal of Scientific Research and Applications*, 11(1), 2101–2110. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0279>
- Oladele, I., Orelaja, A., & Akinwande, O. T. (2024). Ethical implications and governance of AI in business decisions. *International Journal of Latest Engineering and Management Research*, 48–56. <https://doi.org/10.51583/ijltemas.2024.130207>
- Olatoye, F. O., Awonuga, K. F., Mhlongo, N. Z., Ibeh, C. V., Elufioye, O. A., & Ndubuisi, N. L. (2024). AI dan etika dalam bisnis: Tinjauan komprehensif tentang praktik AI yang bertanggung jawab dan tanggung jawab perusahaan. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0235>
- Omokhoa, H. E., Odionu, C. S., Azubuike, C., & Sule, A. K. (2024). AI-powered FinTech innovations for credit scoring, debt recovery, and financial access in microfinance and SMEs. *Global Journal of Accounting and Business Research*, 2(6), 411–422. <https://doi.org/10.51594/gjabr.v2i6.55>
- Pinckaers, C. M., Ozkan, B., Bliet, L., Tsilionis, K., & Klaiber, L. (2024). Menuju pemahaman holistik tentang AI dan ESG: Menjelajahi interaksi dan risikonya.
- Prakoso, P. B., Supriyatno, A., & Djasuli, M. (2022). The relationship between Maqāshid Syari'ah and good corporate governance in Sharia pawnshop companies. *Al-Widad*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.58405/aw.v1i1.7>
- Qudah, H. A., Malahim, S. S., Airout, R. M., Alomari, M., Hamour, A. A., & AlQudah, M. Z. (2023). Islamic finance in the era of FinTech: A bibliometric review of future trends. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 76. <https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>
- Rafiullah, S., Ayaz, M., & Siddique, M. A. (2023). Tata kelola syariah dan manajemen risiko ketidakpatuhan syariah: Penilaian berbasis Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.19>
- Rahman, A., N., Huda, N., & Salman, N. F. B. (2025). Pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia: Peran OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan sistem intern.
- Raji, I. D., Xu, P., Honigsberg, C., & Ho, D. E. (2022). Outsider oversight: Designing third-party audit ecosystems for AI governance. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.04737>
- Ramli, N. M., Ali, N. S. A. M., & Muhammed, N. A. (2018). Integrated reporting based on Maqasid Al-Shariah: A proposed framework for Islamic non-profit organisations. <https://doi.org/10.2991/piceeba-18.2018.80>

- Rane, N. L., Choudhary, S., & Rane, J. (2023). Explainable AI (XAI) for transparency and accountability in financial decision-making. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4640316>
- Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). Etika berbasis kebajikan Islam untuk kecerdasan buatan. *Discover Artificial Intelligence*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-022-00028-2>
- Roy, P., Ghose, B., Singh, P. K., Tyagi, P. K., & Vasudevan, A. (2025). Artificial intelligence and finance: A bibliometric review of trends, influence, and research directions. *F1000Research*. <https://doi.org/10.12688/f1000research.160959.1>
- Sa'ad, A. A., Alhabshi, S. M., Noor, A. B. M., & Hassan, R. (2020). Robo-advisory untuk lembaga keuangan Islam: Masalah syariah dan regulasi. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3992>
- Sachan, S., & Liu, X. (2023). Blockchain-based legal decision audits supported by explainable AI and generative AI tools. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 129, 107666. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107666>
- Safiullah, M. (2020). Efisiensi stabilitas di bank Islam: Apakah tata kelola dewan penting? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 29, 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100442>
- Samala, A. D., & Rawas, S. (2024). Bias in artificial intelligence: Smart solutions for detection, mitigation, and ethical strategies in real-world applications. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 14(1), 32–43. <https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i1.pp32-43>
- Sarim, M., Khan, A., Akhtar, A., & Tabash, M. I. (2019). Keuangan Islam dan tata kelola perusahaan: Model universal yang diusulkan. *International Journal of Business Excellence*, 19(2), 243. <https://doi.org/10.1504/ijbex.2019.102237>
- Schiff, D., Kelley, S., & Ibáñez, J. C. (2024). The emergence of AI ethics auditing. *Big Data & Society*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/20539517241299732>
- Shafiabady, N., Hadjinicolaou, N., Din, F. U., Bhandari, B., Wu, M., & Vakilian, J. (2023). Using artificial intelligence to predict organizational agility. *PLoS One*, 18(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283066>
- Simatupang, O. (2024). AI in accounting and finance: A literature review on challenges, opportunities, and ethical considerations. <https://doi.org/10.63322/t6g9n640>
- Sklavos, G., Theodossiou, G., Papanikolaou, Z., Karelakis, C., & Ragazou, K. (2024). ESG-driven AI governance: Digitalizing corporate leadership and HRM. *Sustainability*, 16(16), 7154. <https://doi.org/10.3390/su16167154>
- Smit, J. (2025). Ethical AI in banking: A sectoral literature review with case-based interventions. *Open Journal of Business and Management*, 13(4), 2420–2430. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2025.134125>
- Solaimani, S. (2024). From compliance to capability: On the role of data and technology in environmental, social, and governance. *Sustainability*, 16(14), 6061. <https://doi.org/10.3390/su16146061>
- Sori, Z. B. M., Hussin, S., & Hamid, B. A. (2025). Developing an ESG disclosure index for Islamic financial institutions: Enhancing transparency and accountability. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5115926>

- Taleb, M., & Kadhum, H. J. (2024). The role of artificial intelligence in promoting environmental, social, and governance (ESG) practices. In *Lecture Notes in Networks and Systems* (pp. 256–279). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-63717-9_17
- Thanasas, G. L., Kampiotis, G., & Karkantzou, A. (2025). Enhancing transparency and efficiency in audit and regulatory compliance with disruptive technologies. *Theoretical Economics Letters*, 15(1), 214–233. <https://doi.org/10.4236/tel.2025.151013>
- Tumewang, Y. K., Dewi, H. R., & Amin, H. (2023). More than a decade of maqashid shariah research: Bibliometric analysis and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2022-0207>
- Uzougbo, N. S., Ikegwu, C. G., & Adewusi, A. O. (2024). Legal accountability and ethical considerations of AI in financial services. *GSC Advanced Research and Reviews*, 19(2), 130–142. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.19.2.0171>
- Wah, J. N. K. (2025). Revolutionizing SME financing: AI and fintech for transparency, efficiency, and inclusion. *Journal of Southwest Jiaotong University*, (2). <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.60.2.6>
- Weber, P., Carl, K. V., & Hinz, O. (2023). Explainable artificial intelligence applications in finance—A systematic literature review in finance, information systems, and computer science. *Management Review Quarterly*, 74(2), 867–907. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00320-0>
- Weber, Y., & Tarba, S. Y. (2014). Strategic agility: A state-of-the-art introduction to the special issue on strategic agility. *California Management Review*, 56(3), 5–12. <https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.3.5>
- Yasmeen, K. (2023). Justice in the workplace: Islamic principles for wage determination. *Islamic Economic Studies*, 31, 43–87. <https://doi.org/10.1108/ies-03-2023-0011>
- Yeo, W. J., van der Heever, W., Mao, R., Cambria, E., Satapathy, R., & Mengaldo, G. (2023). A comprehensive review of financial explainable AI. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.11960>
- Yusof, M. (2024). Kemakmuran inklusif berbasis wakaf: Menjelajahi persinggungan keuangan Islam, fintech, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam *Advances in Finance, Accounting, and Economics* (hlm. 303–334). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch012>